

KONSEP KEKUASAAN DALAM TRADISI BUDAYA JAWA

Oleh
Sardiman AM

Abstrak

Konsep kekuasaan menurut tradisi budaya Jawa itu tampak kontroversial. Satu sisi secara teoretik memiliki teori yang bersifat sistematis dan logis. Akan tetapi, di lain pihak memang berbeda perspektif ilmu politik modern di dunia ini. Akan tetapi, secara empirik telah melakukan kekuasaan yang begitu kuat.

Tulisan ini dimaksudkan ingin mengetahui dan memberikan deskripsi tentang konsep kekuasaan menurut tradisi Jawa; bagaimana proses lahirnya kekuasaan dan bagaimana penguasa (Raja) itu harus menjalankan kekuasaannya. Dalam unsur *pulung* menjadi unsur penting dalam kekuasaan Jawa. Setelah mendapatkan *pulung* legalisasi kekuasaannya, raja harus bersikap *ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta* sebagai pencerminan dari seorang yang "kedunungan pulung".

Dari kajian ini dapat diambil pelajaran bawah hal-hal yang bersifat adikodrati, hal-hal yang bersifat spiritual begitu dominan menandai interaksi antara penguasa (raja) dengan bawahan dan rakyatnya. Kekuasaan bersifat sentralistis dan tampak begitu kuat mempraktikkan sistem pemerintahan yang patrimonial. Rakyat begitu hormat dan setia pada pemimpinnya. Pola semacam ini tampak memiliki gaung yang cukup kuat dalam kepemimpinan di Indonesia. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan pengembangan demokrasi, tentu pola-pola kekuasaan dan kepemimpinan semacam itu perlu adanya modifikasi.

Mengkaji konsep kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa menjadi sangat menarik. Konsep kekuasaan itu begitu menarik sebab di samping secara teoretik konsep kekuasaan Jawa juga memiliki teori yang dapat memberikan penjelasan secara sistematis dan logis tentang perilaku praktik seperti halnya teori-teori modern tetapi secara substansial.

Pendahuluan

Berbicara tentang konsepsi kekuasaan dalam kebudayaan Jawa merupakan kajian yang menarik dan unik. Sebab, secara teoretik konsepsi kekuasaan di Jawa juga memiliki teori yang dapat memberikan penjelasan secara sistematis

dan logis tentang perilaku politik seperti halnya teori-teori politik modern, tetapi secara substantial teori itu berbeda dan juga tidak tergantung dengan perspektif ilmu politik modern yang ada di dunia ini. Bahkan dalam banyak hal boleh dikatakan ada saling kontroversial.

Kekuasaan menurut teori ilmu politik modern seperti dikemukakan oleh Ossep K.Flechheim, adalah keseluruhan kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Jadi, dalam kekuasaan diperlukan adanya kemampuan si penguasa untuk mempengaruhi pihak lain agar setia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa. Dan secara prosedural kekuasaan itu merupakan kristalisasi hasil dari adanya proses interaksi sosial yang bersifat profan, kemampuan yang dibutuhkan oleh si penguasa juga bersifat profan. Hal ini berbeda dengan konsepsi kekuasaan dalam tradisi Jawa yang tidak menekankan kebutuhan kemampuan bagi si penguasa untuk mempengaruhi pihak lain agar patuh kepada perintah si penguasa, tetapi kesetiaan pihak lain (rakyat) itu akan ada dengan sukarela karena pengaruh dari nilai sosio-kultural Jawa yang bersifat adikodrati. Begitu juga kriteria kemampuan seorang pemimpin akan dilihat dari hal-hal yang bersifat spiritual. Faktor-faktor itulah yang membuat konsepsi kekuasaan menurut budaya Jawa menjadi semakin spesifik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka menarik sekali untuk dibahas tentang konsepsi kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa. Setelah pendahuluan ini, berturut-turut akan dijelaskan mengenai hakikat kekuasaan, konsepsi kekuasaan dalam tradisi Jawa dan terakhir penutup.

Hakikat Kekuasaan

Kekuasaan adalah suatu dimensi yang sangat penting dalam pemikiran sosial. Menurut teori ilmu sosial secara umum, kemunculan aspek kekuasaan itu berangkat dari adanya strukturisasi dalam masyarakat yang melahirkan ketidaksamaan antarkelas sosial. Dalam hal ini Andre Beteille menegaskan bahwa adanya gejala ketidaksamaan (*inequality*) dalam kehidupan masyarakat itu bersumber pada dua hal, yakni: pertama, status (ada yang tinggi, ada yang rendah) dan

kedua, organisasi (adanya pembagian tugas dan wewenang dalam struktur organisasi).

Dengan adanya strukturisasi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status dan pembagian tugas dalam organisasi, telah melahirkan pihak yang memiliki otoritas lebih besar dibandingkan yang lain. Dalam konstalasi yang demikian itu muncullah fenomena sosial yang berupa kekuasaan.

Kekuasaan, oleh Laswell dan Kaplan (1950: 74) diartikan sebagai kemampuan dari pihak si pelaku (penguasa) untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain. (yang dikuasai) menjadi sesuai dengan kemauan dari pihak yang menjadi penguasa. Atau dengan kata lain, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan dari seseorang atau pihak tertentu untuk melancarkan pengaruh kepada pihak lain yang menerima pengaruh. Jika kekuasaan itu dimanifestasikan pada diri seseorang, maka orang itu biasa disebut *pemimpin* dan untuk yang menerima pengaruh disebut *pengikut*. Hanya dalam proses menerima pengaruh itu ada yang dengan sukarela, tetapi ada juga yang dengan terpaksa. Oleh karena itu, Carter (1985: 40-46) mengemukakan bahwa kekuasaan itu mempunyai dua ciri: pertama, munculnya kepatuhan yang sukarela, dan kedua, munculnya kepatuhan karena terpaksa.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa hakikat kekuasaan seperti yang dijelaskan di atas adalah kekuasaan menurut teori ilmu politik modern. Hal itu berbeda dengan hakikat kekuasaan menurut tradisi Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan bukan diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang atau pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak lain agar patuh pada penguasa, tetapi merupakan hasil kemampuan bagi seseorang (pemimpin/raja) untuk memuaskan kekuatan *kosmis* dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini rakyat setia dan patuh kepada pemimpin atau rajanya dengan ikhlas dan sepenuh hati sebagai konsekuensi dari nilai-nilai sosio-kultural yang lebih transendental. Kekuasaan menurut tradisi Jawa lebih bersifat *matempiris*, kekuasaan dalam hal ini bukan didasarkan atas kekayaan, pengaruh, relasi atau keturunan semata, tetapi kekuasaan merupakan mandat dari Yang Kuasa kepada seseorang yang memang dipilih.

Oleh karena itu, kekuasaan tidak dapat diperoleh melalui langkah-langkah secara empiris, namun dengan cara-cara

yang bersifat spiritual, yang tidak jarang dikaitkan dengan persoalan-persoalan teologis. Oleh karena itu, Franz Magnis Suseno (1985: 99) menegaskan bahwa kekuasaan itu merupakan ungkapan energi Illahi yang tanpa "bentuk", yang selalu kreatif meresapi seluruh kosmos. Dengan demikian, kekuasaan itu tidak semata-mata gejala khas sosial, tetapi juga bergayut dengan aspek-aspek kultural spiritual yang begitu besar artinya bagi kehidupan masyarakat.

Konsep Kekuasaan dalam Tradisi Jawa

Upaya Mencari Kekuasaan

Di atas sudah disitir bahwa untuk mendapatkan kekuasaan menurut pandangan tradisi Jawa tidak dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang empiris, tetapi banyak dilakukan melalui cara-cara spiritual, cara-cara yang nonempiris. Untuk mendapatkan kekuasaan harus diusahakan dengan pemusatan tenaga kosmis. Namun, tenaga kosmis itu tidak akan diperoleh begitu saja, melainkan memang diberi atau diturunkan dari sesuatu kekuatan supranatural, dari yang kuasa. Menurut pandangan tradisi Jawa hal itu sering terjadi melalui semacam pengalaman panggilan. Orang yang dipanggil atau diberi mandat oleh Yang Kuasa itu biasanya sudah berhasil melakukan langkah-langkah spiritual tertentu. Dalam kaitan ini Anderson menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan itu harus melalui langkah atau praktik-praktik *yoga* dan *bertapa* yang sangat keras atau melakukan *lelana brata* di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Orang yang sedang melakukan *tata brata* itu misalnya dengan berpuasa, tidak tidur, melakukan samadi, tidak melakukan hubungan seksual, mempersembahkan berbagai sesaji, dan sebagainya.

Bertapa, secara lahiriah kelihatan sebagai suatu penyiksaan diri. Akan tetapi, secara kejiwaan menurut pandangan Jawa, bertapa memiliki makna yang sangat khusus. Bertapa bukanlah suatu penyiksaan diri dengan tujuan etis, melainkan semata-mata untuk memperoleh suatu kekuasaan (agar mendapat panggilan atau diberi mandat dari Yang Kuasa untuk berkuasa). Secara ortodoks, bertapa adalah mengikuti hukum kompensasi yang fundamental dan menurut alam pikiran Jawa sebagai suatu upaya mencapai keseimbangan-

an kosmos. Dalam hal ini berlaku prinsip keseimbangan, berkurang di satu pihak untuk menambah di pihak lain, sehingga bertapa itu pada hakikatnya mengurangi diri untuk memperbesar diri. Atau dengan penjelasan lain, kekuatan jasmani dikurangi (diperlemah), tetapi untuk memperkuat rohani dan mempertebal sikap mental. Ini semua dalam rangka pemusatan kekuatan diri untuk mendapatkan *kasekten* atau *kesaktian*. Bertapa yang kemudian melahirkan kesaktian itu dapat dikatakan sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan.

Di samping pandangan ortodoks, kekuasaan itu dapat muncul melalui jalan tradisi lain yang disebut *heterodoks*. Dalam tradisi *Tantrisme*, yakni dengan melalui mabuk-mabukan (ingat kisah raja Singasari, Kertanegara). Menurut pandangan heterodoks ini, bahwa dengan mengikuti hawa nafsu secara sistematis dalam bentuk yang paling ekstrim, dianggap dapat menghabiskan nafsu itu sendiri, sehingga memungkinkan mencapai konsentrasi tanpa ada hambatan lagi. Jadi, maksudnya juga untuk pemusatan kekuatan diri.

Perlu ditegaskan kembali bahwa bertapa adalah proses mendekatkan diri dengan kekuatan Yang Kuasa sehingga tercapai suatu kebersatuan dengan alam Illahi. Kesadaran diri menjadi luluh atau menjadi sangat *khusuk* berada antara kondisi sadar dan tidak sadar, *layap liyeping ngaluyup*. Seseorang yang sedang bertapa dan mencapai kondisi *layap liyeping ngaluyup* itu di samping mendapatkan kesaktian, dia juga akan menerima pulung dari "Yang Kuasa" yang sering dalam bentuk cahaya biru berbentuk bundar yang melayang di langit dan turun ke arah orang yang terpanggil. Cahaya biru yang demikian itu terkenal dengan sebutan *ndaru* atau *pulung*. Hal sejenis ini di kalangan masyarakat Jawa juga dikenal dengan sebutan *wangsit*, atau semacam pulung yang tidak terlihat oleh manusia (Sartono Kartodirdjo, 1984: 222). Seseorang yang tidak terpanggil atau yang tidak menerima pulung, kekuasaan itu tidak mungkin didapatnya. Pulung inilah yang berkaitan dengan kharisma dari seseorang pemimpin (Sartono Kartodirdjo, 1974: 9). Melalui perjuangan yang berat dan penuh *laku*, kesaktian dapat diperoleh, *pulung* dapat diterima dan sekaligus *kharisma* pun bersemayam pada diri seseorang pemimpin itu. Aspek-aspek itu semua merupakan perangkat untuk memperkokoh keabsahan bagi seorang pemimpin dalam mengendalikan kekuasaan, Jadi, kekuasaan seseorang yang

berdasarkan *pulung* itu sulit untuk diganggu gugat oleh rakyatnya. Kekuasaan itu sudah sah. Berkaitan dengan ini maka Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa legitimasi kekuasaan seorang raja bersifat religius. Oleh karena itu, kekuasaan bagi seorang pemimpin di Jawa menjadi kuat posisinya. Untuk melestarikan konstalasi keadaan semacam ini dan sekaligus untuk memperkokoh legitimasi dan *kharisma* seorang pemimpin atau raja biasanya disusunlah Babad oleh pujangga kraton. *Babad* itu pada umumnya menceritakan riwayat dan perjuangan raja dengan berbagai ilustrasi yang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teologis dan aspek-aspek adikodrati yang lain. Semua itu untuk memperkuat kedudukan dan kebesaran seorang raja.

Unsur *ndaru/pulung* dalam kaitannya dengan kekuasaan itu dalam eskalasinya ternyata begitu mendarah daging di lingkungan masyarakat Jawa. Dan pada zaman modern sekarang ini masih banyak orang yang percaya adanya *pulung* atau *ndaru* itu. Tidak hanya raja saja yang dipercayai mendapat *pulung*, tetapi rakyat yang terpilih pun bisa mendapatkan *pulung* atau *ndaru* sesuai dengan tingkatannya. Hal ini terbukti (terutama di daerah pedesaan) kalau ada pemilihan lurah (Kepala Desa), masih banyak di antara mereka kalau malam melihat ke angkasa untuk menyaksikan bila sudah sampai waktunya, ke arah mana *ndaru* atau ada yang menyebut *teluh braja* itu turun. Rumah yang menjadi sasaran turunnya *ndaru* itulah yang salah seorang penghuninya akan terpilih menjadi lurah. Oleh karena itu, seseorang yang mencalonkan diri sebagai lurah, biasanya menjalankan laku prihatin, berpuasa atau tirakat, agar mampu menarik (mendapatkan) *ndaru* yang dimaksud di atas. Ini laku untuk mencari kekuasaan sebagai aspek kultural yang sudah ada sejak jaman dulu.

Konsep Dasar tentang Kekuasaan

Pada uraian di atas sudah disinggung antara lain bahwa seorang pemimpin atau raja di Jawa itu memiliki legitimasi kekuasaan yang sangat kuat. Hal ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh konsep dasar atau pandangan masyarakat Jawa tentang konsep kekuasaan itu sendiri. Berkaitan dengan ini di dalam kebudayaan Jawa dikenal adanya konsep *kosmopolitan* atau menurut Berg (1974: 13) dikenal dengan istilah *Cosmisch gemeenschansgevoel* (rasa persekutuan alam se-

mesta). Dalam hal ini alam semesta dengan suatu sistem akan merupakan keseluruhan organik yang menyatukan unsur yang ada dengan unsur yang ada yang lain. Konsep yang bersifat makrokosmos itu secara empiris dapat diterapkan pada konsep kekuasaan raja yang merupakan mikrokosmos. Jelasnya, unsur yang ada di seluruh wilayah kerajaan itu akan terpusat pada raja. Ini memberikan petunjuk bahwa berdasarkan konsep kosmonolitan, kekuasaan itu lebih bersifat sentralistis. Kekuasaan berada pada satu tangan raja yang kuat sebagai konsekuensi dari *kharisma* dan legitimasinya yang bersifat adikodrati. Raja dalam hal ini dapat dipahami sebagai seorang yang memusatkan pada suatu takaran kekuatan kosmis yang begitu besar dalam dirinya sendiri dan sebagai orang yang sakti. Ia adalah penyangga dari mekanisme kekuasaan yang dikendalikannya. Raja ibaratnya pintu air yang menampung seluruh air sungai dan bagi tanah yang lebih rendah merupakan satu-satunya sumber air dan kesuburan. Ilustrasi ini sebagai suatu indikator bahwa raja yang merupakan penguasa tunggal itu memiliki kekuasaan yang begitu besar tetapi juga menuntut tanggung jawab yang begitu berat. Oleh karena itu, raja sebagai pusat mikro kosmos harus seorang yang kuat. Dengan begitu, perangkat kerajaan dan rakyat akan patuh secara sukarela, bahkan secara ikhlas hidupnya akan diabdikan semata-mata demi raja dan kerajaan. Sikap semacam ini juga diperkuat oleh pandangan dan keyakinan masyarakat Jawa, bahwa raja itu adalah *Kalipatullah* atau Wali Tuhan di dunia ini. Sehingga, kepatuhan rakyat terhadap raja itu bukan karena terpaksa, melainkan benar-benar merupakan kesetiaan yang tulus ikhlas dan merasa itu merupakan kewajiban luhur yang bernilai adikodrati.

Konsep dasar kosmonolitan yang telah menempatkan raja sebagai pusat segalanya dan melahirkan kepatuhan rakyat secara sukarela itu relevan dengan konsep lain, yakni konsep *Kawulo-Gusti*. Konsep *Kawulo-Gusti* menurut tradisi Jawa adalah bentuk hubungan yang akrab tampak ikatan pribadi yang tercermin pada sikap hormat dan tanggung jawab. Yang lebih menarik lagi kalau konsep itu ditinjau lebih mendasar, ternyata memiliki makna mistik, sehingga konsep ini menjadi semakin merasuk di kalangan masyarakat. Rakyat sebagai *kawulo* akan menghormati tuannya (*gusti*) dengan sepenuh hati, ikhlas dan tanpa paksaan. Hal ini diperkuat

dengan suatu keyakinan tentang *nasib* atau sesuatu yang sudah ditakdirkan, sudah *pinesti* (bukan dalam etos kerja). Masyarakat seperti sudah ditakdirkan ada *wong cilik* (orang biasa) dan *penggede* (golongan penguasa), yang masing-masing pihak menerimanya dengan penuh kesadaran. Sebagai kawulo, rakyat akan menghormati dan patuh terhadap penguasa (*gusti*). Di Jawa juga dikenal adanya konsepsi kekuasaan yang dikaitkan dengan konsep *Keagungbinataran* (G. Mudjanto, 1986: 3). Menurut konsep ini jelas bahwa raja memiliki segalanya, baik yang berupa harta maupun manusia pada umumnya. Oleh karena itu, di kalangan rakyat berlaku prinsip *tinggal nderek karsa dalem* (terserah kehendak sang raja). Namun, hal ini tidak berarti raja penguasa tunggal itu akan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sebab, dalam konsep *keagungbinataran* itu juga dirangkai dengan sikap *ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta* (budi luhur dan mulia yang begitu luas/meluap serta sifat adil terhadap semua yang hidup atau adil dan penuh kasih sayang). Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kewenangan yang luar biasa dengan kewajiban dan tanggung jawab yang luhur, yakni mengasahi, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya.

Ketiga konsep dasar, *Kosmopolitan*, *Kawulo Gusti*, dan *Keagungbinataran* itu telah melahirkan interaksi antara penguasa dengan pengikutnya atau raja dengan rakyatnya (antara *kawulo* dengan *Gustinya*) secara "harmonis". Raja dalam hal ini telah menempatkan dirinya sebagai kiblat dan panutan bagi rakyatnya.

Perwujudan dari konsep-konsep tersebut tercermin pada terciptanya kekuasaan yang kuat dan dalam suasana yang tenang. Kemudian diharapkan tercipta kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, aman dan tenteram, serasi dan selaras tanpa gangguan dan semua itu berlangsung tanpa ada paksaan. Semuanya seolah-olah berjalan secara alami. Rakyat tenang dan puas serta ikhlas untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Suasana tenteram dan tenang inilah sebagai perwujudan dari kekuasaan yang sebenarnya.

Kekuasaan yang kuat juga tercermin lewat suasana alam yang subur, tidak ada bencana alam. Jadi, keberhasilan kekuasaan raja secara empiris dapat dilihat dari kehidupan sosial dan geografis yang serba serasi dan mantap. Kalau dalam kerajaan timbul berbagai kegoncangan

atau bencana, adalah tanda-tanda bahwa kekuasaan seorang raja itu perlu dipertanyakan.

Tugas raja sebagai penguasa tunggal memang berat. Di samping secara pribadi raja adalah panutan seluruh rakyat, juga sebagai pejabat atau penguasa harus mampu "mamayu hayuning bawono". Untuk *mamayu hayuning bawono* ini banyak usaha yang dapat dikerjakan oleh raja, seperti di atas sudah dikemukakan, misalnya menciptakan suasana aman dan tenteram, mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya, sehingga kerajaan menjadi *tata tentrem kerta raharja*.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menciptakan dan menjaga kekuasaan yang tenang dan stabil, kerajaan yang *tata tentrem kerta raharja*, diperlukan seorang raja yang besar, yang memiliki keunggulan luar biasa. Seperti juga ditegaskan oleh Soemarsaid Moertono (1985: 47) untuk mempertahankan ketertiban di dunia ini, maka raja haruslah luar biasa keunggulan dan kecakapannya. Atau dengan kata lain, raja harus memiliki *kewicaksanan* (dan tentunya juga disertai *kawaskithan*). *Kewicaksanan: wicaksana* berarti lebih unggul, bijaksana, berpengalaman, berpandangan luas dan jernih, serta berpengetahuan. *Kawaskithan: waskita* berarti mampu melihat hal-hal yang rahasia, seperti pikiran dan niat orang lain, kejadian yang mungkin akan terjadi dan sebagainya. Aspek ini sangat penting sebab merupakan kemampuan yang langka dan dihargai sangat tinggi, tidak hanya memberikan pemiliknya pengetahuan yang luas dan sebanyak mungkin, tetapi juga kesadaran terdalam mengenai kenyataan dan keadilan. *Kawicaksanan* juga dapat diartikan sebagai keterampilan tertinggi tidak hanya dalam menimbang dengan seksama kemungkinan untung rugi dari keputusan seseorang, tetapi juga kemampuan untuk membuat penilaian yang kritis dalam menanggulangi keadaan.

Dengan demikian, *kawicaksanan* merupakan unsur yang penting bagi raja sebagai pengendali kekuasaan. Bahkan dengan *kawicaksanan* ini akan semakin memperkuat hubungan batin antara raja dengan rakyat. Sebab, bagi rakyat raja yang *wicaksana* adalah raja yang berpandangan luas sehingga kalau menangani sesuatu persoalan akan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Begitu sebaliknya, kalau *kawicaksanan* tidak ada pada diri seorang raja apalagi disertai dengan pam-

rih, menuruti hawa nafsu untuk kepentingan pribadi, maka kerajaan itu akan menjadi kacau, tidak normal dan kekuasaan pun menjadi lemah. Bahkan sampai persoalan fisik seperti bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, kemarau panjang, terjangkitnya wabah penyakit, juga yang menyangkut perilaku sosial seperti pencurian, keserakahan, pembunuhan, bagi pandangan orang Jawa semua itu sebagai pertanda kesalahan dan ketidakwicaksanaan raja. Raja sudah kehilangan kharisma dan legitimasi sehingga kekuasaan itu sebenarnya sudah memudar. Menurut keyakinan orang Jawa, raja yang demikian itu adalah raja yang sudah kehilangan *pulung*.

Perlu ditambahkan bahwa konsep dasar kekuasaan menurut budaya Jawa tersebut juga dapat memberi warna terhadap pola kepemimpinan di lingkungan masyarakat Indonesia, yakni sistem kepemimpinan yang *patrimonial*. Sri Sultan Hamengku Buwono X pada saat jumenengannya pernah menegaskan bahwa sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang *patrimonial* yang bersumber pada budaya kraton masih relevan dengan perkembangan sekarang. Sistem pemerintahan *patrimonial* adalah sistem pemerintahan yang sentralis dengan puncak pimpinannya seorang raja (Sultan). Sultan adalah penguasa tunggal di kerajaannya, sekalipun dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh pejabat-pejabat yang ada. Karena sebagai penguasa tunggal, maka Sultan adalah seorang yang *agung binathara, berbudi bawa leksana, waskitha dan wicaksana*. Sultan adalah seorang yang memiliki kekuasaan besar, berkelakuan baik, berwibawa, pandai dan arif bijaksana. Dengan ini maka Sultan (raja) sangat *disuyuti*, dihormati dengan sangat berlebihan sebagai manifestasi dari rasa patuh dan pengabdian rakyat terhadap rajanya. Raja benar-benar menjadi kiblat dan panutan bagi kawula/rakyatnya. Juga dalam sistem pemerintahan yang *patrimonial* itu, hal-hal yang bersifat seremonial begitu dominan (Eric R. Wolf, 1966: 52). Dengan demikian, kalau ditransfer ke konsep kepemimpinan maka kepemimpinan yang *patrimonial* akan memiliki ciri-ciri: pemimpin dengan segala kelebihannya harus menjadi panutan, rasa patuh dan hormat dari rakyat terhadap pemimpinnya begitu berlebihan dan hal-hal yang seremonial menjadi sangat penting. Pola kepemimpinan semacam ini tampak banyak dijalankan di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Hanya karena sifatnya yang sentralis, maka kalau

pemimpin tidak hati-hati justru menimbulkan situasi yang tidak demokratis. Karena, pemimpin sebagai penguasa tunggal, bawahan akan bersikap patuh dan hormat secara berlebihan (bahkan mungkin tidak dengan kesadaran, tetapi karena rasa takut) terhadap pemimpin, sehingga tidak menutup kemungkinan pemimpin bersikap otoriter.

Sistem patrimonial memang masih relevan, tetapi perlu adanya penyesuaian. Dalam kaitan ini ada suatu hal yang cukup menarik dari apa yang pernah dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dalam rangka menciptakan kerajaan dan kehidupan rakyat yang lebih demokratis, kalau sebelumnya berlaku prinsip; praja: praja dalem; kawula: kawula dalem (dapat diartikan kerajaan adalah kerajaanku (raja); rakyat adalah rakyatku (raja) dan begitu seterusnya semua adalah milik raja), diubah oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi: sentana dalem dan abdi dalem semua adalah abdi kerajaan (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985: 12), yang secara makro setelah zaman RI istilah itu menjadi abdi negara. Begitu juga soal upacara-upacara mulai disederhanakan. Sultan Hamengku Buwono IX juga tidak sekedar penguasa tunggal yang menjadi simbol dengan kekuasaan yang memang besar, tetapi mulai turun ke bawah untuk ikut mengatur kehidupan pemerintahan serta menyelami dan memperhatikan keadaan rakyatnya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang lahir dan dibesarkan di lingkungan budaya feodal dan kolonial, telah menjadi figur seorang pemimpin yang demokratis. tentunya ini dapat menjadi cermin bagi para pemimpin.

Penutup

Bagi masyarakat Jawa, kekuasaan adalah salah satu dimensi kehidupan yang *committed* dengan nilai-nilai sosio-kultural yang bersifat adikodrati. Kekuasaan itu sifatnya sosio-empiris sebab legitimasinya berdasarkan pulung. Hal ini ternyata telah mampu menciptakan kesetiaan rakyat terhadap raja sebagai pengendali kekuasaan, dengan tulus hati tanpa ada paksaan. Keadaan semacam ini memang didukung oleh pandangan masyarakat Jawa yang bersumber dari konsep-konsep yang bergayut dengan aspek kekuasaan, seperti konsep kosmopolitan yang telah menempatkan raja sebagai pusat

segalanya, konsep Kawula Gusti yang telah menciptakan kepatuhan rakyat kepada raja dengan ikhlas dan sepuh hati, dikarenakan dipandang bahwa raja adalah wali Tuhan. Dengan demikian, unsur kesetiaan itu ada kaitannya dengan hal-hal dan fenomena yang bersifat adikodrati teologis. Konsep Keagungbinatharaan telah mengajarkan bahwa raja itu sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan sangat besar dan sekaligus sebagai pemilik segala sesuatu. Akan tetapi, raja dalam konsep yang sesungguhnya adalah tidak sewenang-wenang, malahan ia memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang besar, yakni untuk menciptakan kekuasaan yang *tata tentrem kerta raharja dan gemah ripah loh jinawi*, dalam suatu suasana keteraturan dan kesetiaan.

Untuk mengusahakan keadaan kerajaan di Jawa seperti yang dimaksud di atas, diperlukan seorang raja yang kuat dan memiliki *kawicaksanan* dan *kawaskithan*. Tanpa itu kemungkinan besar kerajaan akan kacau. Kekacauan kerajaan adalah pertanda lemahnya kekuasaan seorang raja. Atau dengan kata lain, legitimasi otoritas seorang raja sudah memudar, yang menurut pandangan budaya Jawa, pulungnya sudah ditarik kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Konsep kekuasaan sebagai bagian dari warisan budaya Jawa tersebut tampaknya masih berpengaruh terhadap kehidupan sekarang. Sebagai bukti masih adanya ciri-ciri kepemimpinan yang patrimonial di lingkungan lembaga pemerintah maupun swasta. Akan tetapi, dalam rangka menghidupkan aspek demokrasi, sistem patrimonial perlu ada modifikasi. Suasana demokratis dan keteladanan serta sikap "kebabakan" dari seorang pemimpin tampaknya masih diperlukan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict R.O.G. 1986. "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa", dikutip dalam Meriam Budihardjo (ed.). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Berg, C.C. 1974. *Penulisan Sejarah Jawa*. Jakarta: Bhatara.
- Carey, April. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. alih bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali.

- Jong, S. de. 1985. *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Laswel, Harold D & Abraham Kaplan. 1950. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Mangkunegara IV, KGPA. 1959. *Wedatama Gantjaran*. Solo: Keluarga Soebarno.
- Miriam Budihardjo. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mudjanto, G. 1986. *The Concept of Power in Javanese Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pudjiwati Sajogyo. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: FPS IKIP Jakarta dan BKKBN.
- Sartono Kartodirdjo. 1974. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- _____. 1984. *Modern Indonesia Tradition & Transformation*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soedarisman Poerwokoesoemo. 1985. *Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemarsid Martono. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis. 1985. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Wolf, Eric R. 1966. *Peasants*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries, spanning most of the page.